



**DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAMBAHAN**



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : W8-A/456/OT.01.3/2/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 28 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 4 Januari 2021



[Handwritten Signature]
Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19550816 198103 1 004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Sisa Perkara yang diselesaikan = sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No.02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putusan yang menarik masyarakat = Putusan Perkara Ekonomi Syariah. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Kode Dokumen
MM

Tanggal Pembuatan
04 January 2021

Tanggal Revisi
-

Tanggal Efektif
04 January 2021

NO	SASARAN	TARGET	STRATEGI/PROGRAM	FREKUENSI ANALISA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan	100%	Memeriksa dan Memutus sesuai dengan ketentuan waktu sesuai dengan SEMA No 02 tahun 2004 tentang tentang Penyelesaian perkara tingkat Pertama dan banding	1 Tahun	Laporan Bulanan dan tahunan Register Perkara	Majelis Hakim, Panitera, Panmud Hukum
2	Presentasi Perkra Yang diselesaikan Tepat waktu	100%	Monitoring Ketua setiap bulan terhadap perkara yang sedang berjalan dan memeberikan arahan tentang lamanya batasan waktu perkara putus	1 Tahun	Laporan Bulanan dan tahunan Register Perkara	Majelis Hakim, Panitera, Panmud Hukum
3	Presentase Penurunan Sisa Perkara	20%	Monitoring perkara agar terselesaikan tepat waktu	1 Tahun	Laporan Bulanan dan tahunan Register Perkara	Majelis Hakim, Panitera, Panmud Hukum
4.	Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Kasasi	80%	1. Ketua memberikan arahan kepada Majelis Hakim agar memutus seadil adilnya agar pihak menerima putusan itu 2. Mempelajari berkas perkara dengan cermat 3. Menyusun pertimbangan hukum secara cermat	1 Tahun	Laporan Bulanan dan tahunan Register Perkara	Majelis Hakim, Panitera, Panmud Hukum
5.	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	1. Melayanani dengan setulus hati dan memuts dangan seadil-adilnya 2. Melaksanakan sesuai dengan SOP	1 Tahun	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Majelis Hakim, Panitera, Panmud Hukum, Sub Kepegawaian dan IT
6	Presentase Salinan Yang dikirm Ke Pengadilan tepat waktu	100%	1.Melakukan Monitoring sesuai waktu 2. Mengirmkan sesuai salinan SOP 3. Menelitberkas yang akan dikirim	1 Tahun	Register Perkara Banding	Majelis Hakim, Panitera, Panmud Hukum, Sub Kepegawaian dan IT
7.	Presentase Perkara yang yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) diputus dan dipublish dalam waktu 1 hari	100%	1. Menyelesaikan Konsep Putusan sebelum dibacakan 2. Melakukan Anonimasi Putusan sebelum diupload 3. Mengupload putusan ke SIPP sesuai SOP	1 Tahun	Lapoaran Bulanan dan Register Perkara Banding	Majelis Hakim, Panitera, Panmud Hukum, Sub Kepegawaian dan IT
8.	Kesesuaaian realisasi anggaran denagn rencana penarikannya	95%	1. Mengurangi revisi Anggaran 2. Percepatan Realisasi anggaran yang telah direncanakan 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan atas pelaksanaan anggaran secara berkala	1 Bulan	LRA, KIPAS	Sub Keuangan dan Pelaporan

9.	Meningkatan Kepemimpinan untuk pejabat struktural	10%	1. Menginventarisir Pejabat struktural 2. Mengusulkan Ke Balitbangdiklatkumdi	1 Tahun	Surat Usulan PTA Bandar Lampung	Sub Kepegawaian dan teknologi IT
10.	Meningkatkan nilai LKJIP	Naik	1. Membentuk Tim Evaluasi terhadap Lkjiip Tahun Lalu 2. Menindaklanjuti Hasil Penilaian tahun lalu 3, Melakukan Review LKjiIP Tahun lalu	1 Tahun	Dokumen SAKIP	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
11.	Meningkatkan Kehadiran Pegawai Tepat waktu	90%	1. Mengumumkan pegawai yang datang telat 2. Atasan secara berjenjang memberikan teguran lisan	1 bulan	Absensi Pegawai	Sub BagianKepegawaian dan TI
12	Peningkatan Kompetensi dan Ujian Dinas serta penyesuain Ijazah	1 Orang	1. Mengusulkan Kepada Biro Kepegawaian MA RI 2. Memfasilitasi Pelaksanaan	1 Tahun	Surat Usulan	Sub BagianKepegawaian dan TI